

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dasar untuk terselenggaranya “Good Governance” yang artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Adapun dasar-dasar terselenggaranya “Good Governance” yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang –Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat

mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Aceh Jaya ini dimaksudkan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya dimasa yang akan datang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan melalui perbaikan pelayanan publik. Ada pun tujuannya adalah :

- a. memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran pelaporan dan evaluasi kinerja Badan perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun Anggaran 2015;
- b. sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Badan perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya di masa yang akan datang;

- c. untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Badan perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya sehingga tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang tertuang dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan wewenang tugas Bupati Aceh Jaya dalam pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Jaya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencana dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektoral diharapkan dapat mengakomodasikan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik sesuai dengan Qanun Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010.

Keadaan Personil Bappeda Kabupaten Aceh Jaya mempunyai 27 orang pegawai yang terdiri dari 17 orang pejabat struktural, 10 orang sebagai staf. Jumlah tersebut menggambarkan jumlah yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, efektif dan efisiensi serta tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga, dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya. Ketersediaan peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat

menghambat kinerja sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian;
- b. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan setiap tahun;
- c. Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia;
- d. Kurangnya pedoman prosedur kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda;

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan Qanun No. 3 Tahun 2010. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
  - Subbagian Administrasi dan Umum
  - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - Subbagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian , terdiri dari;
  - Subbidang Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam
  - Subbidang Dunia Usaha dan Investasi
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari;
  - Subbidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
  - Subbidang Pembangunan Sosial dan Budaya

- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur, terdiri dari;
  - Subbidang Survey dan Pemetaan
  - Subbidang Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari;
  - Subbidang Penelitian dan Pengembangan
  - Subbidang Data Informasi dan Statistik

### Tingkat Pendidikan

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

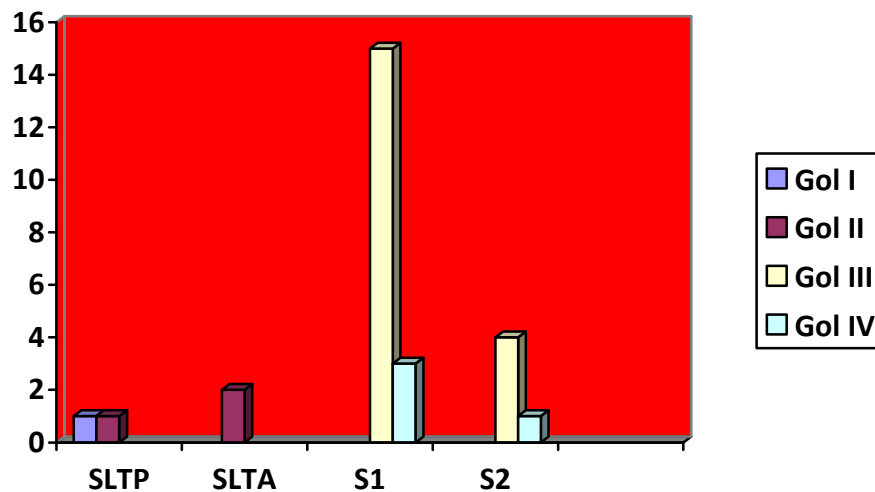
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Bappeda Kab. Aceh Jaya Menurut Tingkat Pendidikan sebagai berikut ;

No	Pendidikan	Golongan							Jumlah
		Tenaga Bakti	Cleaning Service	Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	4	-	1	1	-	-	6
3	SLTA	2	-	9	-	2	-	-	13
4	Sarjana Muda/DIII	-	-	2	-	-	-	-	2

5	Sarjana	2	-	3	-	-	15	3	23
6	Pasca Sarjana	-	-	1	-	-	4	1	6
	Jumlah	4	4	15	1	3	19	4	50

*Ket : Data Bulan Desember 2015*

**Grafik 1.1.**  
**Distribusi Pegawai Negeri Sipil Bappeda**  
**Menurut Golongan dan Pendidikan**



Distribusi Pegawai Bappeda Kab. Aceh Jaya Menurut Tingkat Pendidikan

*Sumber: Subbag. Adm dan Umum Bappeda Kab. Aceh Jaya, Desember 2015*

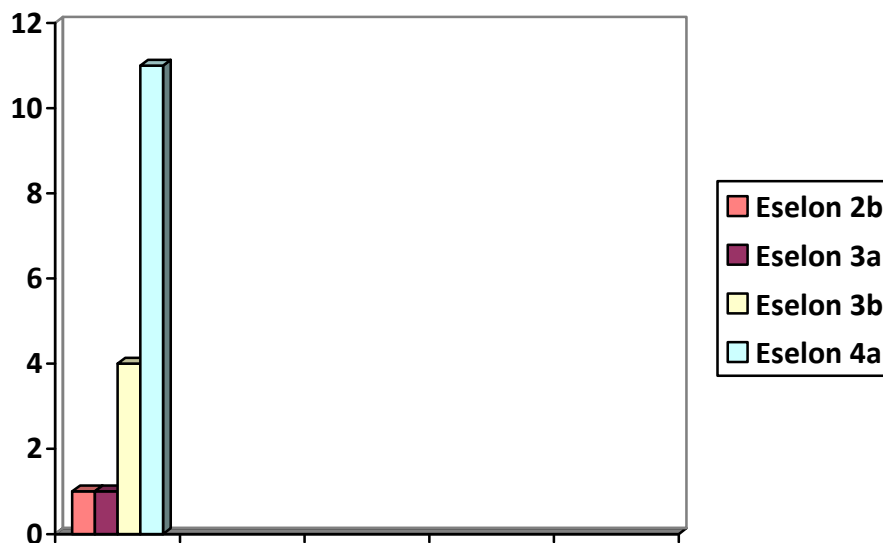
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2015. Capaian kinerja (*performance results*) 2014 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 sebanyak 27 orang, dan jumlah jabatan struktural menurut eselon berdasarkan data pejabat eselon pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat diuraikan pada tabel 1.2. di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 1.2. dan  
Grafik 1.2.  
Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon  
Bappeda Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015

No.	Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	1
3.	III a	1
4.	III b	4
5.	IV a	11
6.	IV b	-
J u m l a h		17



## 1.4. ISU STRATEGIS

### ANALISA SWOT

#### Kekuatan (Strong)

- a. Adanya sistem perencanaan pembangunan di seluruh bidang
- b. Adanya komitmen di seluruh komponen perencana;

#### Kelemahan (Weakness)

- a. Belum optimalnya kapasitas SDM baik kualitas maupun kuantitasnya;
- b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan;
- c. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

#### Peluang (Opportunity)

- a. Melengkapi peralatan pendukung yang memadai;
- b. Meningkatkan koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan;
- c. Memanfaatkan peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal;
- d. Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan kepercayaan eksternal terhadap perencanaan pembangunan ;

#### Ancaman (Threat)

- a. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah
- b. Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan



Analisa Lingkungan Eksternal	Analisa Lingkungan Internal	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weaknesses)
			Adanya sistem perencanaan pembangunan di seluruh bidang
		Adanya komitmen di seluruh komponen perencana	Belum optimalnya koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan;
			Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Peluang (Opportunity)		SO	WT
Melengkapi peralatan pendukung yang memadai;		Adanya SDM perencana yang memadai dengan memanfaatkan peralatan pendukung yang memadai	Mengoptimalkan data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah
Meningkatkan koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan;		Adanya SDM perencana yang memadai dengan memanfaatkan program beasiswa pendidikan formal	Mengoptimalkan data dasar (basic data) dan menghilangkan ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan
Memanfaatkan peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal;		Adanya sistem perencanaan pembangunan di seluruh bidang dengan meningkatkan koordinasi penyusunan program tahunan	
Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan		Adanya komitmen untuk memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	
Ancaman (Threats)		ST	WO
Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah		Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan	Melengkapi peralatan dengan mengoptimalkan kapasitas SDM baik kualitas maupun kuantitas
Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan		Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan	Meningkatkan koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan dengan mengoptimalkan koordinasi penyusunan program pembangunan

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 5 (lima) tahun kedepan (2012-2017) adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kapasitas SDM baik kualitas maupun kuantitasnya;
- b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan;
- c. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

## Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAKIP Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Bappeda Kabupaten Aceh Jaya (kondisi geografis, gambaran umum demografi dan potensi sosial ekonomi daerah). Bab I juga berisi inovasi daerah, struktur organisasi perangkat daerah, aparatur Bappeda Kabupaten Aceh Jaya, isu strategis serta sistematika penyajian.

### Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Rencana Strategis Daerah, Strategi, Kebijakan, Program, Tema dan Program Prioritas, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 dan Penetapan Kinerja tahun 2015. Bab ini juga berisi Pencapaian IKU 2015

### Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian kinerja tahun 2015, juga Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja 2015 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya.

### Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

## IKTISAR EKSEKUTIF

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
  - 1. Kondisi Geografis
  - 2. Gambaran Umum Demografis
  - 3. Inovasi Daerah
  - 4. Struktur Organisasi
  - 5. Aparatur
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

### BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
  - 1. Visi
  - 2. Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
  - 1. Tujuan
  - 2. Sasaran
  - 3. Arah Kebijakan dan Program Tahun 2015
- C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
- D. Program Untuk Pencapaian Sasaran
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
- F. Indikator Kinerja Utama

### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Tahun 2015
- B. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya
  - 1. Sasara I

2. Sasaran II

3. Sasaran III

4. Sasaran IV

C. Analisa Indikator Kinerja Utama

D. Analisis Prgram/Kegiatan Penunjang keberhasilan dan kegagalan.

E. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP